

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGURANGAN PEREDARAN
PRODUK ILEGAL DI MASYARAKAT
(Studi Pada Program *Pre* dan *Post Market* di BPOM Kota Bandarlampung)**

Skripsi

Oleh

OKTA HADI SAPUTRA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGURANGAN PEREDARAN PRODUK ILEGAL DI MASYARAKAT (Studi Evaluasi Program *Pre* dan *Post Market* BBPOM Kota Bandarlampung)”

Oleh
Okta Hadi Saputra

Sebagai lembaga publik BBPOM mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Program *pre-market* dan *post-market* ini bertujuan untuk mengurangi produk ilegal yang beredar luas di masyarakat di Provinsi Lampung khususnya Kota Bandarlampung. Masih banyak ditemukannya ribuan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar, ilegal, dan tidak layak konsumsi. Penelitian ini memfokuskan pada program pengurangan peredaran produk ilegal melalui program *Pre* dan *Post market*. Metode penelitian ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta penganalisisan data.

Hasil penelitian ini adalah program BBPOM Kota Bandarlampung dalam upaya pengurangan produk ilegal di Provinsi Lampung. dalam bentuk program *Pre Market* sebelum beredarnya produk dimasyarakat dan *Post Market* sesudah suatu produk mempunyai nomor registrasi. Pengawasan secara formal dan non formal sudah dilakukan untuk mengurangi produk ilegal yang beredar dimasyarakat, serta BBPOM Kota Bandarlampung berkerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung dan Bea Cukai dalam upaya mengurangi produk ilegal dimasyarakat. Dengan hasil tersebut maka BBPOM Kota Bandarlampung yang termasuk organisasi pemerintah, bertujuan mengurangi produk ilegal yang beredar luas di masyarakat, walaupun masih ditemukan beberapa kekurangan dan hambatan yang dialami oleh BBPOM Kota Bandarlampung.

Penelitian ini merekomendasikan saran untuk BBPOM Kota Bandarlampung guna meningkatkan kualitasnya sebagai organisasi pemerintah dengan meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaku industri. Serta BBPOM Kota Bandarlampung mampu memberika sanksi hukuman yang tegas terhadap pelaku industri yang masih mengedarkan dan menjual produk ilegal dimasyarakat. Dan dibutuhkanannya peran masyarakat yang tanggap dalam membantu BBPOM Kota Bandarlampung mengurangi produk ilegal yang beredar.

Kata kunci:*Pre Market, Post Market, BBPOM Kota Bandarlampung, pengawasan, mengurangi , produk ilegal.*

ABSTRACT

THE PROGRAM EFFECTIVENESS ON ILLEGAL PRODUCTS REDUCTION IN THE COMMUNITY (An Evaluation Study of Pre and Post Market Program Conducted by BBPOM Bandar Lampung)

**By
Okta Hadi Saputra**

As a public institution, the National Agency of Drug and Food Control (BBPOM) carries a duty in the field of drug and food control. The drug and food control is an integral part of Indonesia's health development program. The pre-market and post-market program aims to reduce illegal products circulating widely in the community in Lampung Province, especially in Bandar Lampung City. There are still thousands of drug and food products that do not meet the standards, illegal, and unfit for consumption. This research focused on the program of reducing the circulation of illegal products through Pre and Post market program. The method used in this research is descriptive type with qualitative approach. The data collection technique in this research was carried out by conducting interview, observation, and documentation, and also data analysis.

The result of this research can be concluded that BBPOM Bandar Lampung has established a program as an attempt to reduce the circulation of illegal products in Lampung Province in form of Pre Market program (before the products circulated in the community) and Post Market program (after the products registered). Further, the agency has applied formal and non-formal supervision to reduce illegal products circulating in the community, and BBPOM Bandar Lampung has established a cooperation with relevant agencies such as the Health Department of Bandar Lampung City and Customs Office as an effort to reduce the circulation of illegal products. With these results, BBPOM Bandar Lampung which includes government organizations, aims to reduce illegal products circulating widely in the community, although there were still some shortcomings and obstacles encountered by BBPOM Bandar Lampung.

It is suggested that BBPOM Bandar Lampung to improve its quality as a government organization by increasing the supervision and monitoring over industry players. BBPOM Bandar Lampung shall impose a firm penalty against the perpetrators of industries that still circulate and sell their illegal products in the community. Eventually, the need of a responsive community in helping BBPOM Bandar Lampung can reduce the illegal circulation of the products.

Keywords: Pre Market, Post Market, BBPOM Bandar Lampung, supervision, reduce, illegal products.

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGURANGAN PEREDARAN
PRODUK ILEGAL DI MASYARAKAT
(Studi Pada Program *Pre* dan *Post Market* di BPOM Kota Bandarlampung)**

Oleh

OKTA HADI SAPUTRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PROGRAM
PENGURANGAN PEREDARAN PRODUK
ILEGAL DI MASYARAKAT (Studi Pada
Program *Pre* dan *Post Market* di BBPOM Kota
Bandarlampung)**

Nama Mahasiswa : **OKTA HADI SAPUTRA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1346041053

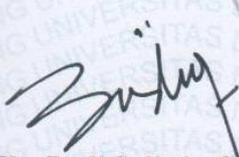
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ketua

Sekretaris


Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP
NIP. 19780923 200312 1 001


Devi Yulianti, S.AN, M.A
NIP. 19850705 200812 2 004

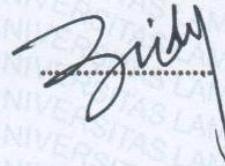
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Noverman Duadji, M.Si
NIP. 19750720 200312 1 002

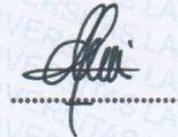
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

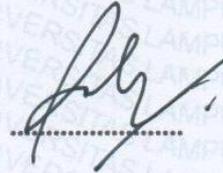
Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP**



Sekretaris : **Devi Yulianti, S.AN, M.A**



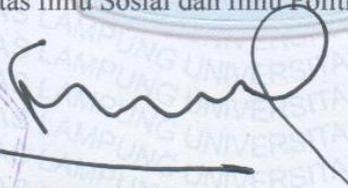
Penguji Utama : **Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 April 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/ Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 20 April 2018

Yang membuat pernyataan,



Okta Hadi Saputra

NPM. 1346041014

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Okta Hadi Saputra, dilahirkan pada 17 Oktober 1995 di 15a Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro, Lampung dari pasangan Bapak Saebun, As dan Ibu Sepriyana, S.pd.

Penulis adalah anak ke dua dan memiliki satu orang kakak laki-laki bernama Prayoga Eka Saputra, S.P. serta tiga orang adik laki-laki bernama Riski Nanda Saputra, Riko Nanda Saputra dan Aditya Panca Saputra.

Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 5 Metro Pusat tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Metro Timur 2007. Penulis menempuh pendidikan lanjutan di SMA 1 Muhammadiyah Metro Barat, Metro 2011/2013. Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2013 melalui jalur Pararel.

Selama di kuliah penulis aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) UNILA sebagai Anggota Bidang Minat dan Bakat pada tahun 2013-2017. Selain itu penulis juga aktif sebagai Atlet dan Pelatih Wheeling Lampung Inline Skate Club 2015 sampai Sekarang.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

(QS.13:11)

Hidup seperti perlombaan berlari, namun bukanlah siapa yang tercepat melainkan siapa yang mampu konsisten dalam mengejar sehingga mampu melampaui.

(Okta Hadi Saputra)

90% kesulitan itu hanya ada di imajinasimu, keluarlah dari sana maka kamu akan melihat pelangi.

(Jack Ma)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kepada Allah SWT yang Maha baik, dan telah meridhoi penyusunan skripsi ini dengan banyak proses serta pelajaran yang disisipkan oleh NYA selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.

Terimakasih yang tak terhitung untuk kedua orang tua dan keluarga tercinta:

Papi Saebun dan Mami Sepriyana

Dan kepada kakaku: Bung, Adikku: Riski, Riko, Adit.

Terimakasih kepada para dosen yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan dan doa. Untuk selalu membanggakan Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, dengan yakin atas rencana Allah SWT beserta segala rahmat, rohmaan, dan rohiim NYA, skripsi dengan judul Efektivitas Program Pengurangan Peredaran Produk Ilegal di Masyarakat (Studi Pada Program *Pre* dan *Post-Market* di BBPOM Kota Bandarlampung) ini telah selesai pada waktu terbaik menurut perencanaanNYA. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari ada banyak sekali pihak yang membantu dari berbagai aspek, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtuaku bapak dan ibu terimakasih atas semuanya terimakasih sudah sejauh ini memberikan dukungan. Semoga Allah menjaga bapak ibu dalam rahmat, keimanan dan ketaqwaan.
2. Saudara-saudaraku tercinta Bung, dan ketiga adikku Riski, Riko, dan Adit. Terimakasih atas semuanya maaf belum bisa jadi adik serta kakak yang baik.
3. Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing utama. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, ilmu, waktu, nasehat, dan tenaga selama ini. Terimakasih telah menjadi mentor yang baik, yang telah mengajari cara berfikir dan berkembang. Terimakasih banyak Pak Eko, semoga Allah menjaga Bapak dan keluarga selalu dalam kebaikan.
4. Ibu Devi Yulianti, S.AN, M.A. selaku dosen pembimbing kedua. Terimakasih atas bimbingan, motivasi, dukungan, semangat, ilmu, waktu, tenaga, arahan,

serta nasehatnya selama ini. semoga Allah menjaga kebagikan Ibu beserta keluarga dimanapun dan kapanpun.

5. Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembahas. Terimakasih atas setiap saran, kritik dan masukan yang membangun selama ini bu. Semoga Ibu dan keluarga selalu dirahmati Allah.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S., Bapak Syamsul Ma'arif, S.Ip., M.Si., Bapak Dr.Bambang Utoyo S, M.Si., Bapak Dr. Dedi Hermawan, S.Sos., M.Si., Ibu Dewie Brima Atika, S.I.P, M.Si., Ibu Dr.Novita Tresiana, Bapak Dr.Noverman Duadji, M.Si., Bapak Nana Mulyana, S.I.P., M.Si., Ibu Meiliyana, S.Ip., M.A., Ibu Dra.Dian Kagungan, M.H., Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. terimakasih banyak atas setiap ilmu yang diajarkan kepada penulis.
7. Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terimakasih telah membantu setiap urusan administrasi yang dibutuhkan penulis selama ini.
8. Dra. Setia Murni. Apt. Kepala BBPOM Kota Bandarlampung. Terimakasih atas keramahan dan apresiasinya kepada peniliti ini, semoga BBPOM Kota Bandarlampung mampu menjadi lebih baik lagi.
9. Bapak Firdaus Umar, S.Si, Apt, Ibu Tuti Nurhayati, S.Si, Apt., Bapak Drs. Tri Suyarto, Apt, dll, selaku pegawai BBPOM Kota Bandarlampung. Terimakasih telah membantu memberikan informasi untuk penelitian ini.
10. Keluarga Mama Canni, mama canni, kak io, cannia, ion, kak ncik dan nadia. Terimakasih telah sangat baik dan menerimaku selayaknya keluarga. Mama canni yang selalu memberikan masukan, saran, motivasi, dan solusi atas permasalahan terimakasih banyak, kak io tetap jadi hafidz Qur'an dan di tambah

lagi hafalannya, canni jaga semangat dan motivasinya untuk tetap jadi atlit sepaturoda yang hebat, orion kurangi belajar lagu gak jelas ya dek dan diganti dengan belajar mengaji aja, kak ncik dan nadia semoga cepet dapet jodoh.

11. Suci Aprodity, S.A.N., terimakasih banyak telah memberikan motivasi dalam segala hal, masukan tentang skripsi, dan memberikan semangat untuk melewati tahap-tahap dalam mencapai hidup yang lebih baik, walaupun sangat sering berantem karena skripsi beda pendapat dan argument tapi penulis berterimakasih untuk tetap sabar mendampingi menjadi patner, menjadi teman sahabat, bahkan orang yang spesial hingga sekarang dan nanti.
12. Teman-teman Alasmenara: Sidik (ketum yang ngelawak gk jelas), Uun (ibu negara), Pindo (ketua angkatan yang sok bijak, tapi bagus), Leo (pemburu cinta sejati), Dinda (yang orang yang mageran tapi kompre duluan), Dimas (manusia berbadan besar dan komika gagal, tapi dia baik walaupun gila), Hafiz (yang baik dan cekatan gak pikir panjang nolongin orang), Adi (pembisnis sejati), Zulham (bakalan jadi gamer kayanya), Ari (si lampung kentel), Ayu W, Dila, Hendro (sang musisi, yang jadi sipir), Dwi, Eka, Laras, Ratu, Riska, Sasa, Luse, Arinta, Desti (manusia tinggi dan murah senyum), Rindu (yang suka korea), Pepah (bakal jadi pacar dinda), Zikri (kapan manggung bareng lagi), Meilika (pacar Zikri), Ade, Agnes, Fajar, Andan, Anggi (cepat kelarin skripsi tinggalin game), Asti, Ayu Krui, Cici, Eci, Emon, Devi P, Devi Y, Nuris , Ellyza, Elva, Fella, Ghozie (si gendut dengan ketawa khas), Isti, Hendriyansyah (si aneh), Kartika F, Lela, Hasby (hati-hati naik sepadah), Iqbal (si polos yang bakal jadi ustad), Nanda, Nisa, Nita, Oca (yang nikah duluan), Yoga (budak Prabumulih), Yogi (bli Pesawaran), Galih (si hitam jawa medok),

Resghi (si pelukis aneh), Respaty (si pendiam), Revardo (rambut tebal), Rico (si batak berkacamata), Syntia, taufiq, Tiara, Tulva, Vania, Wahyu (yang suka hilang), Wiza, Wulan, Arif (pacar defita yang bakal di tinggal nikah), BJ Shedy (sahabat dari awal masuk), Dewi A, Fitri W, Hendriko (sok galak), Jita, Maya, Meylani, Pepy, Rahma, Rijkiana, Sarah (kapan manggung bareng lagi), Kartika R, Edo (pak polisi), Bayu (yang sudah punya anak), Khaidir (bujang jawa yang gk nyelesain kuliahnya), Gibran (si gagah IPDN).

13. Keluarga besar HIMAGARA, terimakasih banyak Anti Mapia, Ampera, Gelas Antik dan Atlantik yang telah membersamai dan mengajarkan banyak hal kepada penulis selama kuliah di FISIP Unila. Terimakasih abang-abang dan mbak-mbak dari angkatan lain, telah meninggalkan jejak yang dapat dijadikan pelajaran bagi penulis.

14. Keluarga besar BAJANGHOOD, Igal (terus semangat selesaikan skripsi tahun ini, tetap jadi orang yang keren, hebat dan raih semua mimpi-mimpi jangan terlena di zona nyaman), Aam (raih semua ambisi yang sudah dibuat dari smp tetap teguh pada pendirian, jangan jadi uler dan belajarlah menjadi lebih baik lagi dalam menjalani hidup), Arif (cepet dapet jodoh rif, kalo sudah sukses jangan lupa bajang-bajang ini), Reja (semoga direstuiin, belajar lebih dewasa), Giat (mulai dewasa geh, raih mimpi dengan jalanmu sendiri), Yudi (jangan jadi tambah absurt, D3 rasa S2, cepet kelarin cepet kerja cepet nikah, konsisten pada tujuan-tujuan hidup), Husen (harus pd dengan ketololan itu kelebihan, cepet jadi jaksa), Syamsi, Ilham (Dua kawan yang sukses duluan, tetap jadi pak pol yang keren jujur tapi nakal dikit gpp), Oki (pelawak bukan ini orang, harus kelar kuliah tahun ini), Mico (temen duet si pelawak, cepet nikah), Fadly

(susah bedain mana Ariel noah dengan ini orang, kalo sudah sukses cepet nikah)

15. Semua pihak yang membantu secara langsung atau tidak langsung selama penulis kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan usaha yang maksimal sesuai dnegan kemampuan peneliti. Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau penelitian lanjutan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukan.

Bandar Lampung, 20 April 2018

Penulis

Okta Hadi Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik.....	9
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2. Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	11
B. Evaluasi Kebijakan	15
1. Definisi Evaluasi Kebijakan.....	15
2. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan	16
3. Alasan Evaluasi Kebijakan	18
C. Efektifitas	19
1. Pengertian Efektifitas	19
2. Ukuran Efektifitas	21
D. Pengertian Program.....	28
1. Program <i>Pre Market</i> dan <i>Post Market</i> BBPOM	29
a. Pengertian program <i>Pre Market</i> dan <i>Post Market</i> BBPOM	29
b. Manfaat program <i>Pre Market</i> dan <i>Post Market</i> BBPOM.....	30
c. Tujuan Program <i>Pre Market</i> dan <i>Post Market</i> BBPOM.....	31
E. Produk Ilegal	31
1. Pengertian produk Ilegal	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	33
B. Fokus Penelitian	34
C. Lokasi penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Pengolahan Data	40

F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Teknik Keabsahan Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandarlampung	46
1. Sejarah Singkat BBPOM Kota Bandarlampung	46
2. Visi dan Misi Balai Besar POM Bandarlampung	47
3. Tujuan dan Sasaran Balai Besar POM Bandarlampung	48
4. Tugas Pokok dan Fungsi BBPOM Kota Bandarlampung	53
5. Struktur Organisasi Balai Besar POM Bandarlampung.....	54
B. Hasil Penelitian	56
1. Ukuran Efektifitas	56
a. Ketepatan Sasaran Program	57
b. Sosialisas Program	60
c. Pencapaian Program	63
d. Pengawasan dan Pemantauan Program.....	67
2. Faktor Penghambat Efektivitas Program <i>Pre-Market</i> dan <i>Post-Market</i> dalam mengurangi Produk Ilegal di masyarakat.....	70
a. Faktor Penghambat	70
C. Pembahasan.....	76
1. Pengukuran Efektifitas Program Pengurangan Peredaran Produk Ilegal di Masyarakat (Studi Pada Program <i>Pre</i> dan <i>Post-Market</i> di BBPOM Kota Bandarlampung).....	77
a. Ketepatan Sasaran Program Pengurangan Peredaran Produk Ilegal di Masyarakat (Studi Pada Program <i>Pre</i> dan <i>Post-Market</i> di BBPOM Kota andarlampung)	78
b. Sosialisasi Program Pengurangan Peredaran Produk Ilegal di Masyarakat (Studi Pada Program <i>Pre</i> dan <i>Post-Market</i> di BBPOM Kota Bandarlampung).....	80
c. Pencapaian Tujuan Program Pengurangan Peredaran Produk Ilegal di Masyarakat (Studi Pada Program <i>Pre</i> dan <i>Post-Market</i> di BBPOM Kota Bandarlampung)	82
d. Pengawasn dan Pengamantauan Program Pengurangan Peredaran Produk Ilegal di Masyarakat (Studi Pada Program <i>Pre</i> dan <i>Post-Market</i> di BBPOM Kota Bandarlampung)	83
2. Faktor Penghambat Program Pengurangan Peredaran Produk Ilegal di Masyarakat (Studi Pada Program <i>Pre</i> dan <i>Post-Market</i> di BBPOM Kota Bandarlampung)	87
a. Faktor Penghambat	87

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jenis Produk Ilegal di Lampung tahun 2015-2016	5
2. Daftar Informan Penelitian.....	37
3. Sumber Data Dokumen	39
4. Contoh Tabel Triangulasi	43
5. Sasaran Pengawasan di Provinsi Lampung.....	58
6. Pengukuran Kinerja	59
7. SDM BBPOM Kota Bandarlampung berdasarkan pendidikan.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tahap-tahap Kebijakan William N.Dunn	11
2. Tahap-tahap Kebijakan Ripley	13
3. Struktur Organisasi BBPOM Kota Bandarlampung	55
4. Produk obat-obatan ilegal hasil penyitaan BBPOM Kota Bandarlampung	65
Produk obat tradisional tanpa izin edar hasil penyitaan BBPOM Kota Bandarlampung	65
5. Produk kosmetik tanpa izin edar hasil penyitaan BBPOM Kota Bandarlampung	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komoditi obat dan makanan merupakan salah satu hal strategis dalam perdagangan karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia. Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan produk yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, di sisi lain kondisi ini juga berdampak buruk bagi konsumen, dimana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis para pelaku usaha yang mencari keuntungan semata, baik melalui promosi, cara penjualan, mutu produk, maupun kandungan obat dan makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Laju pertumbuhan perusahaan obat dan makanan di Indonesia ternyata telah mendorong maraknya produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya beredar di masyarakat.

Produk obat dan makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya tanpa disadari bahwa produk obat dan makanan tersebut dapat mengandung zat berbahaya. Produk obat yang mengandung zat berbahaya masih dijual bebas di pasaran seperti di apotek, toko obat, pasar, maupun swalayan, sehingga membuat masyarakat resah. Produk makanan seperti yang terdapat pada jajanan sekolah, makanan olahan, dan makanan kemasan yang berada di pasar dan di toko-toko tradisional tanpa kita sadari makanan tersebut dapat mengandung zat berbahaya.

Sama halnya dengan produk makanan yang berada di toko-toko modern atau swalayan yang sering kali kita anggap bersih dalam hal penyediaan produk makanan pun tidak luput dari ancaman bahan dan zat tambahan berbahaya. *(sumber: www.pom.go.id, di akses pada tgl 08 Februari 2017 pukul 15.30 WIB)*

Pemerintah memiliki kebijakan publik, dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi maupun keamanan. Kebijakan publik bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, ketentraman, kedamaian masyarakat, melindungi dan mengayomi hak-hak masyarakat, mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Menjaga masyarakat terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat khususnya ancaman produk ilegal dan berbahaya seperti yang telah di ungkapkan sebelumnya menjadi salah satu tugas pemerintah dalam menciptakan keamanan dan melindungi masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kebijakan publik yang di buat pemerintah dalam menangani produk-produk baik obat-obatan, kosmetik dan makanan yang beredar di masyarakat disalurkan kepada lembaga khusus. Dalam hal ini pemerintah telah membentuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). BBPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mempunyai tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang perubahan keanamaan atas keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen..

BBPOM ini ada di setiap daerah termasuk Provinsi Lampung, BBPOM Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan produk obat dan makanan bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota serta dinas-dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta Kepolisian. Sistem pengawasan BBPOM Kota Bandar Lampung terkait pengawasan produk obat dan makanan yaitu dengan memeriksa setiap produk obat dan makanan sebelum beredar di masyarakat dengan melalui tahap sertifikasi, dan pemeriksaan sarana produksi produk obat dan makanan.

Pengawasan Balai Besar Provinsi Lampung juga dilakukan dengan melakukan pemeriksaan setelah produk obat dan makanan beredar di masyarakat melalui pemeriksaan sarana distribusi produk obat dan makanan serta melakukan sampling dan uji laboratorium terhadap produk yang dicurigai mengandung bahan berbahaya yang beredar di masyarakat. Pelaksanaan pengawasan BBPOM Kota Bandar Lampung terhadap produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang beredar di masyarakat sering terlambat dan masih sebatas jika ada kasus yang sedang hangat (*booming*).

Peran BBPOM dalam melakukan pengawasan juga belum menyeluruh ke semua sarana produksi dan distribusi di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Proses

pengawasan terhadap produk obat dan makanan tidak dilakukan secara ketat setiap waktu, pengawasan hanya diintensifkan pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal. Pengawasan produk obat dan makanan yang sering terlambat dan tidak intensif setiap waktu tersebut menyebabkan masih adanya produsen dan distributor yang menjual produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya. Pengawasan produk obat dan makanan yang tidak ketat dan belum menyeluruh ini juga mengakibatkan terus maraknya produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya di Provinsi Lampung. Produk-produk tersebut seperti produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, produk obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), serta produk makanan mengandung bahan berbahaya.

Lemahnya koordinasi antara BBPOM dengan penegak hukum dalam memberi sanksi hukum mengakibatkan belum tegasnya penegakan hukum kepada produsen dan distributor yang melanggar. Ketidaktegasan penegak hukum dalam memberi sanksi hukum ini juga mengakibatkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Terkadang sanksi bagi produsen dan distributor nakal tidak sebanding dengan keuntungan finansial yang didapat oleh pelanggaran. Misalnya, sanksi denda hanya jutaan rupiah, padahal nilai produk ilegal yang mereka jual bernilai miliaran rupiah.

Masih banyak ditemukannya ribuan produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar, ilegal, dan tidak layak konsumsi yang beredar di wilayah Kota Bandarlampung menyebabkan masih ada masyarakat yang belum terlindungi dari bahaya produk obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya. Hal Ini

didukung dengan penjelasan Kepala BBPOM Kota Bandarlampung, Setia Murni yang menyatakan bahwa Balai Besar POM Provinsi Lampung pada pengawasan Tahun 2015-2016 telah menjaring dan memusnahkan sekitar 1.827 jenis produk ilegal.

Tabel 1. Jenis Produk Ilegal di Lampung tahun 2015-2016

No	Jenis Produk Ilegal	Jumlah
1.	844 kosmetik tanpa izin edar	3.948 kemasan
2.	565 jenis obat tradisional yang mengandung bahan terlarang	19.729 kemasan
3.	265 jenis obat keras	1.730 kemasan
4.	116 jenis obat	857 kemasan
5.	37 jenis pangan tanpa izin	1.970 kemasan

(sumber: www.fajarsumatera.co.id, di akses pada tanggal 26 Desember 2016 pukul 10.00 WIB).

Dari data tersebut dapat dilihat masih sangat banyak produk ilegal yang beredar di masyarakat khususnya masyarakat Provinsi Lampung. Dalam hal ini BBPOM Kota Bandarlampung memiliki program pengawasan *Pre-Market* dan *Post-Market*, pengawasan *Pre-Market* merupakan pengawasan sebelum barang beredar di masyarakat yaitu dengan melakukan pemeriksaan produk dan pemeriksaan sarana produksi. Sedangkan pengawasan *Post-Market* merupakan pengawasan yang dilakukan setelah barang beredar di masyarakat dengan melakukan inspeksi langsung ke sarana distribusi, seperti: *distributor*, toko, depot, minimarket, dan *hypermarket*.

Evaluasi biasanya bertujuan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan

dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Di sisi lain pelaksanaan program ini masih terdapat beberapa hambatan sehingga program belum berjalan baik dan efektif seperti yang diharapkan contohnya seperti Sumber daya manusia yang digunakan belum mencukupi karena luasnya area yang perlu diawasi tidak diimbangi dengan jumlah pengawas yang memadai, satu pegawai atau pekerja dapat menjalani lebih dari satu peran dan lebih dari satu pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga kinerjanya pun menjadi kurang efektif. Adapun hambatan lain dalam pelaksanaan program ini adalah regulasi.

Sebagai lembaga publik BBPOM mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi BBPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari program *pre-market* dan *post-market* program ini bertujuan untuk mengurangi produk ilegal yang beredar luas di masyarakat khususnya di Provinsi Lampung. Program ini bentuk atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Program ini dilaksanakan selama kurang lebih 14 tahun yaitu dimulai sejak

Tahun 2002. Dalam melaksanakan program ini, BBPOM Kota Bandarlampung di bantu oleh Dinas Kesehatan Bandarlampung menetapkan skala prioritas dimana pengawasan dilakukan secara terfokus pada suatu wilayah atau daerah, penetapan skala prioritas berdasarkan jumlah penduduk terbanyak, ragam sediaan obat dan makanan, serta jumlah industri terbanyak yang ada di suatu kabupaten atau kota dengan membandingkan Kabupaten atau Kota yang lain dalam satu provinsi.

Dari data di atas peneliti meneliti lebih dalam tentang efektivitas program tersebut dalam mengurangi peredaran produk ilegal di Provinsi Lampung. dan penelitian selanjutnya peneliti tuangkan dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul :

“Efektivitas Program Pengurangan Peredaran Produk Ilegal di Masyarakat (Studi Evaluasi Program *Pre* dan *Post-Market* BBPOM Kota Bandarlampung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan yang hendak di jawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas program pengurangan peredaran produk ilegal di masyarakat, terhadap program pre-market dan post-market BBPOM Kota Bandarlampung tahun 2017?
2. Apa saja kendala yang menghambat efektivitas program pengurangan peredaran produk ilegal di masyarakat, terhadap evaluasi program pre-market dan post-market BBPOM Kota Bandarlampung tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan di lakukan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Program Pengurangan Peredaran Produk Ilegal di Masyarakat, terhadap Evaluasi Program Pre-Market dan Post-Market BBPOM Kota Bandarlampung Tahun 2017.
2. Menyimpulkan kendala yang menghambat Efektivitas Program Pengurangan Peredaran Produk Ilegal di Masyarakat, terhadap Evaluasi Program Pre-Market dan Post-Market BBPOM Kota Bandarlampung Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian menambah referensi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang Kebijakan Publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian menjadi salah satu masukan serta informasi kepada pemerintah Provinsi Lampung khususnya BBPOM Kota Bandarlampung untuk lebih meningkatkan pengawasan dalam mengurai produk ilegal di Provinsi Lampung dan menjadi informasi bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli produk obat dan makan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Sinaga (2013:56) kebijakan atau dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai “*whatever government choose to do or not to do*” yaitu apapun yang dipilih oleh pemerintah dalam menentukan suatu kebijakan apakah dilakukan atau tidak sama sekali.

Hal tersebut diperkuat oleh Dunn dalam Syafiie, (1999:107) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Selanjutnya Freadrich dalam Agustino (2006:7) mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga

menunjukkan bahwa ide kebijaksanaan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan yang sesungguhnya dikerjakan dari pada yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Dye dalam Dunn (2003:11), terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan tiga elemen kebijakan tersebut sebagai kebijakan publik/ *public policy*, pelaku kebijakan/ *policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/ *policy environment*. Berdasarkan uraian di atas, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan-tindakan atau kegiatan dilakukan oleh *stakeholder* yang terdapat kesempatan atau hambatan dalam pelaksanaan yang berguna untuk kepentingan orang banyak agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

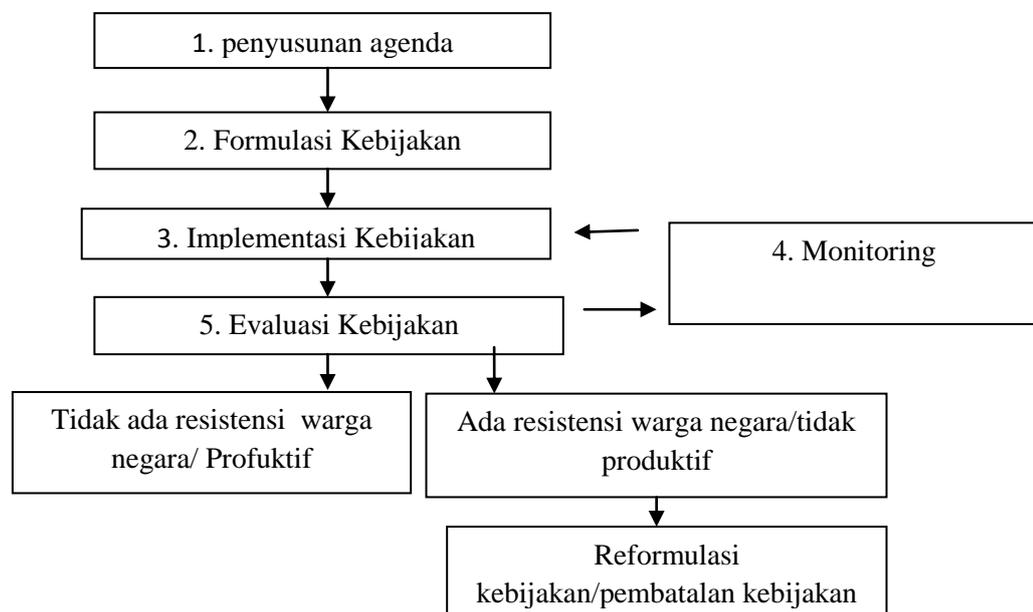
Dalam menjaga masyarakat terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat khususnya ancaman produk ilegal dan berbahaya seperti yang telah diungkapkan sebelumnya menjadi salah satu tugas pemerintah dalam menciptakan keamanan dan melindungi masyarakat sesuai UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kebijakan publik yang di buat pemerintah dalam menangani produk-produk baik obat-obatan, kosmetik dan makanan yang beredar di masyarakat disalurkan kepada lembaga khusus yaitu BPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan). Sebagai lembaga publik BPOM mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang

membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari program *pre-market* dan *post-market* program ini bertujuan untuk mengurangi produk ilegal yang beredar luas di masyarakat khususnya di Provinsi Lampung.

2. Tahap – Tahap Kebijakan Publik

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan –tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Tahap-tahap pembuat kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

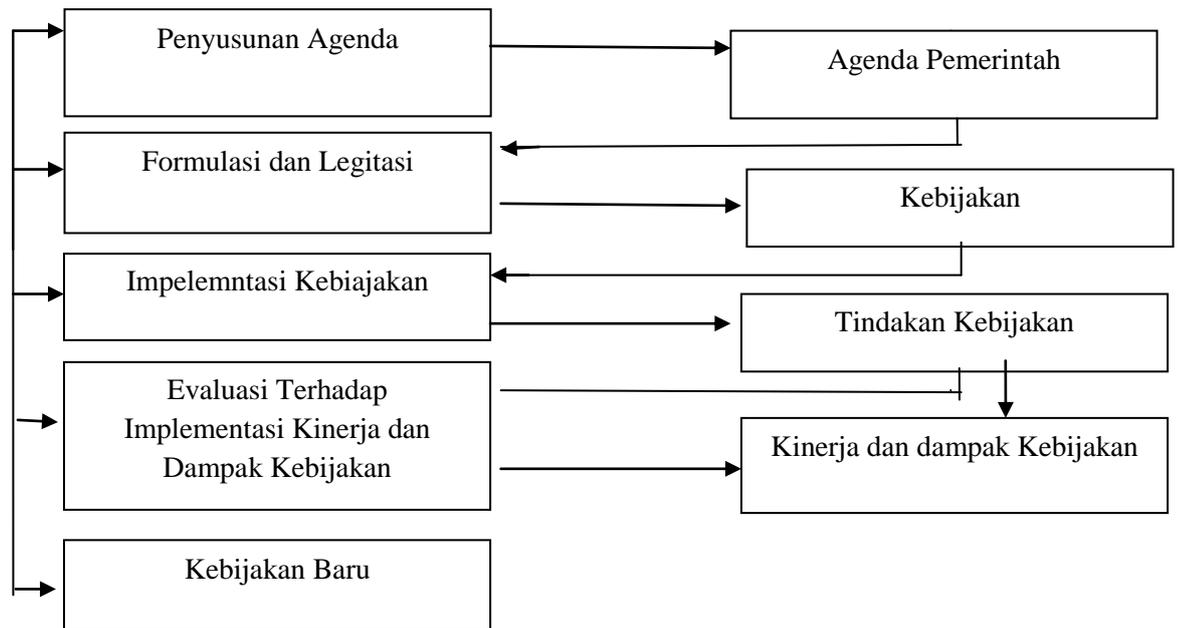
Gambar 1. Tahap-Tahap Kebijakan William N. Dunn



Sumber: Dunn dalam Sinaga (2013:60)

1. Penyusunan Agenda, para pengambil kebijakan (Eksekutif, Legislatif) menginventarisir persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Dari berbagai persoalan yang telah di inventarisir maka akan dilihat mana persoalan yang dapat ditempatkan sebagai prioritas utama untuk diselesaikan.
2. Formulasi Kebijakan, pada tahap ini persoalan yang telah disepakati sebagai prioritas yang harus diselesaikan kemudian dibahas bersamaan dengan pencarian permasalahan masalah. Dalam situasi ini banyak alternatif permasalahan dipaparkan dan bisa dikatakan berbagai alternatif pemecahan masalah saling berkompetensi agar dapat diterima menjadi permasalahan yang terbaik.
3. Implementasi Kebijakan, pada tahap ini kebijakan yang telah diadopsi kemudian diimplementasikan. Implementasi kebijakan akan menjadi efektif kepada warga negara apabila kebijakan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada warganegara mengetahui secara pasti bahwa kebijakan tersebut sungguh benar atau sah keberadaanya.
4. Evaluasi Kebijakan, setelah kebijakan diimplementasikan, pada tahap ini harus diikuti dengan tahap monitoring agar perkembangan kebijakan dapat diketahui, dalam arti kebijakan tersebut bisa diterima oleh mayoritas warga negara atau tidak diterima oleh mayoritas warga negara. Monitoring memiliki peran yang penting agar memudahkan mengumpulkan informasi terkait perkembangan kebijakan setelah diimplementasikan dan hasil dari monitoring sebagai bahan bagi tahap evaluasi kebijakan.

Gambar 2. Tahap-Tahap Kebijakan Ripley



Sumber : Repley dalam Suharno (2008:23)

a. Pada tahap penyusunan agenda kebijakan ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan, antara lain :

- 1) Membangun persepsi di kalangan *stakeholders* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah.
- 2) Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.
- 3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintahan

b. Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian

berusaha dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

c. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme intensif dan sanksi agar implementasi tersebut berjalan dengan baik.

d. Tahap Evaluasi Terhadap Implementasi, Kinerja dan dampak kebijakan

Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentu kebijakan baru dimasa yang akan datang. Agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

Berdasarkan tahap-tahap proses kebijakan publik diatas, maka dalam penelitian ini akan membahas pada tahap evaluasi terhadap implementasi Program Pengurangan Peredaran Produk Ilegal di Masyarakat (Studi Evaluasi Program Pre-Market dan Post-Market BBPOM Kota Bandarlampung Tahun 2017) sehingga akan diperoleh efektivitas dari program tersebut.

B. Evaluasi Kebijakan

1. Definisi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauhmana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konsituennya, sejauhmana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan-kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

- a. Selanjutnya Suharno (2008:219), menyebutkan bahwa kegiatan evaluasi merupakan tahap penting bagi keseluruhan proses analisis kebijakan publik. Kegiatan ini dapat memberikan satuan nilai tertentu terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan dan juga dapat menjadi pintu baru untuk memasuki kegiatan pembuatan dan analisis kebijakan berikutnya.
- b. Dunn dalam Agustino (2006:187) mendefinisikan secara sederhana evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai dan manfaat-manfaat kebijakan dari hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakann memang terpenuhi dengan baik.

- c. Menurut Sinaga (2013:61), evaluasi dapat dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan. Pada tahap ini harus diikuti dengan tahap monitoring agar perkembangan kebijakan dapat diketahui, apakah kebijakan tersebut bisa diterima oleh mayoritas warga negara atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu dampak dari suatu kegiatan kebijakan publik yang merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik dan untuk menilai serta memonitoring sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk di pertanggungjawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

2. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Samudra, dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan memiliki 4 fungsi, antara lain:

- a. Ekspalasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan/kegagalan program.
- b. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosudur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

- d. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Suharno (2008:222), ada 3 variabel dari fungsi evaluasi kebijakan, antara lain :

- a. Fungsi paling mendasar dari kegiatan evaluasi kebijakan adalah untuk memberikan informasi valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi mengungkap dan mengukur seberapa jauh ketercapaian kebutuhan dan nilai melalui nilai dan tindakan kebijakan publik.
- b. Fungsi kedua, evaluasi memberi kontribusi untuk upaya klarifikasi dan kritik atas nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi dapat memperjelas nilai dengan cara mendefinisikan tujuan dan target secara operasional.
- c. Fungsi selanjutnya, evaluasi menunjang pelaksanaan prosedur-prosedur lainnya dalam analisis kebijakan, seperti perumusan masalah, rekomendasi dan kegiatan lainnya. Evaluasi kebijakan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, akan tetapi yang terkait dengan kegiatan analisis kebijakan yang lain.

Dunn (2003-609), mendefinisikan evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, antara lain:

- a. Fungsi pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan

publik, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu.

- b. Fungsi kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoprasikan tujuan dan target.

3. Alasan Evaluasi Kebijakan

Menurut Suharno (2008:221), terdapat dua dimensi alasan kebijakan harus dievaluasi, yang bersifat internal dan eksternal. Antara lain:

a. Internal

- 1) Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijan. Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses ataukah sebaliknya
- 2) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuan atau tidak
- 3) Untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan. informasi yang memadai tentang nilai sebuah kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang salam dalam implementasi yang serupa atau kebijakan lai pada masa-masa yang akan datang.

b. Eksternal

- 1) Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu

bentuk pertanggung jawaban pengambilan kebijakan kepada publik, baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi tindakan kebijakan

- 2) Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan. Dengan adanya kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat luas, khususnya kelompok sasaran dan perima, manfaat dapat mengetahui manfaat kebijakan secara lebih terukur.

Berdasarkan adanya alasan evaluasi di atas, maka Efektivitas Program Pengurangan Peredaran Produk Ilegal di Masyarakat (Studi Evaluasi Program Pre-Market dan Post-Market BBPOM Kota Bandarlampung Tahun 2017) merupakan alasan internal dalam evaluasi kebijakan yaitu mengemukakan penilaian apakah program tersebut mencapai tujuan atau tidak.

C. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Berbagai upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan dapat dilihat keefektivasannya apabila upaya-upaya tersebut mampu mencapai tujuan yang sudah direncanakan oleh kelompok atau organisasi tersebut. Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan tercapai dengan baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan

sasaran yang dituju. Georgopoulos dan Tannenbaum dalam Steers (1985:50), meninjau efektivitas dari sudut pencapaian tujuan, berpendapat bahwa rumusan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarnya. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sarana maupun tujuan-tujuan organisasi.

Efektivitas menurut Katz dan Kahn dalam Steers (1985:54), ialah usaha mencapai keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara. Sedangkan menurut Emerson dalam Handayani (2006:16), mengemukakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Pasolong (2013:51), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Kemudian menurut Sedarmayanti (2006:61), efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang efektivitas, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran dalam pelaksanaan kegiatan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang direncanakan sebelumnya oleh organisasi tersebut dan dengan pola kekuasaan hubungan atasan dengan masyarakat yang tepat, tujuan yang ingin dicapai pun dapat tercapai atau tepat guna sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Ukuran Efektivitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian (2004:77), yaitu:

- a. Tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan.
- d. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- e. Tersedianya sarana dan prasarana, salah satu indicator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
- f. Pelaksanaan efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan dengan tujuan.
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Menurut Cambell yang dikutip oleh Steers (1985:46-48) menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

- a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi,
- b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan,
- c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik,
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut,
- e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi,
- f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya,
- g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu,

- h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu,
- i. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki,
- j. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan,
- k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan,
- l. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) mengatakan ukuran efektivitas adalah sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa factor yaitu prosedur proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

Pendapat lain, Sugiyono dalam Budiani (2007:53) menyebutkan variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Dari sejumlah definisi pengukur efektivitas yang telah dikemukakan di atas, peneliti menggunakan variabel-variabel untuk mengukur efektivitas adapun variabel-variabel yang sesuai dalam pengukuran efektivitas pengurangan produk ilegal dimasyarakat (studi evaluasi program *pre market* dan *post market*) menurut berbagai ahli adalah ;

1. Menurut Siagian (2004:77), yaitu:
 - a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
 - b. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
2. Menurut Cambell yang dikutip oleh Steers (1985:46-48)
 - a. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki,
 - b. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
3. Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53)
 - a. Pencapaian Tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan

pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa factor yaitu prosedur proses sosialisasi.

4. Menurut Sugiyono dalam Budiani (2007:53) menyebutkan variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

- a. Ketepatan sasaran program, menurut Makmur (2011:5) yaitu berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan, jadi semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan sasaran program dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya, Apabila sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil dicapai

maka hal itu dikatakan efektif. Sebaliknya jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak tercapai atau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka dikatakan tidak efektif.

- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Metode pemantauan/monitorin dapat menggunakan metode pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan apabila pihak yang memonitor melakukan kegiatannya pada lokasi program yang sedang dilaksanakan. Teknik-teknik yang sering digunakan dalam pendekatan ini adalah wawancara dan observasi. Kedua teknik ini digunakan untuk memantau kegiatan, peristiwa, komponen, proses, hasil dan pengaruh program yang dilaksanakan. Pendekatan tidak langsung digunakan apabila pihak yang memonitor tidak terjun langsung ke lapangan, namun dengan menelaah laporan berkala yang disampaikan oleh pada penyelenggara program, atau dengan mengirimkan kuesioner secara berkala kepada para penyelenggaranya atau pelaksana program.

Jadi dari berbagai variabel-variabel pengukur efektivitas menurut para ahli di atas peneliti menggunakan variabel pengukur efektivitas menurut Sugiono dalam Budiani (2007:53) alasan peneliti menggunakan variabel tersebut adalah karna melihat gejala-gejala yang terjadi di latar belakang masalah, dimana latar belakang masalah disebutkan faktor-faktor yang dibahas dalam variabel pengukur efektivitas menurut Sugiono dalam Budiani (2007:53) itu sendiri.

D. Pengertian Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasikan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yaitu kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integral untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan. Program dapat pula dijelaskan sebagai kebijakan dalam hal tujuan yang ingin dicapai. Program tersebut merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Charles O. Jones (1996:295), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak, yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik.

Apabila program dikaitkan dengan efektivitas maka keefektifitasan suatu program tersebut dapat diukur dan dapat dinyatakan berhasil pelaksanaannya atau sebaliknya. Seperti Program *Pre market* dan *Post market* BBPOM yang sedang dilaksanakan di Provinsi Lampung untuk mengurangi produk ilegal yang beredar di Provinsi Lampung, apakah program tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran atau malah sebaliknya.

1. Program *pre Market* dan *Post Market* BBPOM

a. Pengertian Program *Pre Market* dan *Post Market* BBPOM

Pengawasan *pre-market evaluation* dilakukan melalui penilaian data penunjang dan pengujian laboratorium serta sertifikasi sarana produksi sesuai persyaratan *Good Manufacturing Practices (GMP)*, penilaian (*pre-market evaluation*) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya

dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

Pengawasan *post-market* dilakukan melalui inspeksi sarana produksi, distribusi, dan pelayanan serta melakukan *sampling* dan pengujian laboratorium untuk menjamin mutu Obat dan Makanan, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/ penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan. (*sumber: www.pom.go.id, di akses pada tgl 09 Februari 2017 pukul 13.30 WIB*)

b. Manfaat Program *Pre Market* dan *Post Market* BBPOM

Adapun manfaat Program *Pre Market* dan *Post Market* BBPOM adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.
- 2) Memastikan bahwa obat dan makanan yang diproduksi di dalam negeri mampu bersaing dengan produk impor.
- 3) Memberantas peredaran Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu.

c. Tujuan Program *Pre Market* dan *Post Market* BBPOM

Adapun tujuan Program *Pre Market* dan *Post Market* BBPOM adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia aman dari bahaya produk ilegal.
- 2) Menjaga predaran Obat dan Makanan sesudah dan sebelum dipasarkannya di masyarakat.
- 3) Mengurangi Predaran Produk Ilegal di Masyarakat.

E. Produk Ilegal

1. Pengertian Produk Ilegal

Suatu produk tidak dapat dilepaskan dari namanya pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen. Suatu produk juga tidak dapat dikatakan memiliki nilai jual, jika produk tersebut tidak menarik bagi konsumen. Perkembangan jaman pun mengakibatkan tingginya kebutuhan masyarakat yang mendesak berbagai pihak untuk berbuat nakal dalam mendapatkan penghasilan lebih salah satunya dengan tindakan memasarkan produk-produk ilegal di masyarakat.

Pengertian produk menurut William J. Stanton yang diterjemaahkan oleh Rakhmat A. (1996:222), Produk menurut artinya secara sempit, produk adalah sekumpulan atribut fisik secara nyata yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasi. Sedangkan secara umumnya, produk adalah sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata yang didalamnya tercakup warna, harga, kemasan, prestise pengecer, dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang

mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginannya.

Menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Hendra Teguh, SE, Ak. (1997:53), produk memiliki pengertian yang luas yaitu segala sesuatu yang ditawarkan, dimiliki, dipergunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan termasuk didalamnya adalah fisik, jasa, orang, tempat, organisasi serta gagasan.

Pengertian ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

Jadi, menurut penulis produk ilegal ialah barang-barang yang dijual atau diedarkan di masyarakat luas untuk di perjual belikan tetapi tidak memiliki standarisasi yang sesuai dengan hukum dan tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena menggambarkan atau melukiskan keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumen. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan dengan Efektivitas Program *Pre-Market* dan *Post-Market* BBPOM Kota Bandarlampung dalam mengurangi Produk Ilegal di Provinsi Lampung secara sistematis dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4).

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Menurut Moleong (2011:93) masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut.

Fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Efektivitas pengurangan produk ilegal di masyarakat (studi evaluasi Program *Pre-Market* dan *Post-Market* BBPOM Kota Bandarlampung) melalui :

1. Pengukuran Efektivitas pengurangan produk ilegal di masyarakat (studi evaluasi Program *Pre-Market* dan *Post-Market* BBPOM Kota Bandarlampung) dengan beberapa indikator menurut Sugiyono dalam Budiani (2007:53) yaitu :
 - a. Ketepatan sasaran program, dengan Program *Pre-Market* dan *Post-Market* BBPOM dapat mengurangi produk ilegal yang beredar di Provinsi Lampung dengan sasaran yang tepat dan sudah ditentukan sebelumnya
 - b. Sosialisasi program, kemampuan penyelenggara Program *Pre-Market* dan *Post-Market* BBPOM dalam melakukan sosialisasi program tersebut, sehingga informasi Program *Pre-Market* dan *Post-Market* BBPOM dapat tersampaikan kepada masyarakat

- c. Pencapaian tujuan program, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil dari Program *Pre-Market* dan *Post-Market* BBPOM dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - d. Pemantau program yaitu pengawasan yang dilaksanakan setelah Program *Pre-Market* dan *Post-Market* BBPOM dilakukan, sebagai bentuk perhatian kepada penerima pelayanan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Efektivitas Program *Pre-Market* dan *Post-Market* BBPOM Kota Bandarlampung dalam mengurangi Produk Ilegal di Provinsi Lampung.
 - a. Faktor internal
 - Sumber Daya Manusia
 - Aggaram
 - Fasilitas
 - b. Faktor eksternal
 - Pelaku industri
 - Konsumen

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini di pilih berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Moelong (2011:128) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data peneliti yang akurat.

Lokasi untuk penelitian ini adalah BBPOM Kota Bandar Lampung yang berlokasi Jl. Dr. Susilo No. 105 Pahoman Enggal. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Lampung. Dan adapun pelaku industri untuk penelitian ini seperti penjual kosmetik di pusat pebelanjaan Simpur Kota Bandar Lampung, penjual obat tradisional di pasar tengah Kota Bandar Lampung dan pelaku usaha rumahan seperti toko klontong di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih pelaku industri untuk mengetahui adakah pelaku industri yang masih tidak patuh menjual dan mengedarkan produk ilegal di masyarakat. Serta peneliti memilih lokasi dan lembaga BBPOM ini karena di Bandar Lampung merupakan satu-satunya lembaga di Provinsi Lampung yang menaungi kebijakan pemerintah dalam menangani dan mengawasi produk-produk baik obat-obatan maupun kosmetik dan makanan yang beredar di masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, diperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian maka pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2012:317), mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dimana wawancara dapat dilakukan baik dengan terstruktur dengan menggunakan paduan

wawancara (*interview guide*), maupun wawancara bebas (tidak terstruktur) bersama dengan observasi. Istrument yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah *tape recorder*, dan dilengkapi juga dengan catatan-catatan kecil peneliti serta foto-foto.

Dalam penelitian ini jenis wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara langsung dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti, pada proses ini mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Efektivitas program *Pre-Market* dan *Post-Market* BBPOM Kota Bandarlampung. Pertanyaan tersebut dapat membantu peneliti menumukan jawaban dari rumusan penelitian yang mengacu pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian

NO	Informan	Jabatan	Informasi	Waktu
1	Drs. Tri Suyarto, Apt	KA. BID. Sertifikasi & LIK	1. Informasi mengenai bagaimana program <i>pre market</i> dan <i>post market</i>	21 Agustus 2017
2	Dra. Adalina Br Sinuraya, Apt.	KA. Seksi layananan informasi konsumen	BBPOM berjalan dalam mengurangi produk ilegal.	23 Agustus 2017
3	Firdaus Umar, S.Si, Apt	KA. BID, Pemeriksaan & Penyidikan	2. Informasi tentang apasajakah hal-hal yang menghambat program <i>pre market</i> dan <i>post market</i>	21 Agustus 2017
4	Tuti Nurhayati, S.Si. Apt	KA. Seksi Penyidikan	BBPOM dalam upaya mengurangi produk ilegal. 3. informasi apakah program <i>pre market</i> dan <i>post market</i> BBPOM sudah efektif dalam mengurangi produk	23 Agustus 2017

NO	Informan	Jabatan	Informasi	Waktu
			ilegal di provinsi Lampung.	
5	Ellyana Titin	Warga/Konsumen	1. Pengetahuan masyarakat mengenai program Pre market dan Post market	22 September 2017
6	Herry Pratama	Mahasiswa/Konsumen	BBPOM dalam mengurai produk ilegal.	23 September 2017
7	Ica	Warga/Konsumen	2. Pengetahuan masyarakat mengenai produk ilegal yang beredar di provinsi Lampung.	22 September 2017
8	Widya	Dosen/Konsumen		23 September 2017
9	Ike Aryadi	Pedagang Rumahan	1. masih adakah produk ilegal yang dijual bebas dimasyarakat.	23 September 2017
10	Bambang Tri Irawan	Pedagang Kosmetik	2. kenapa produk ilegal masih dijual dimasyarakat.	23 September 2017

Sumber : *diolah peneliti, 2017*

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumentasi digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder. Adapun dokumen yang dilihat peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Sumber Data Dokumen

No	Dokumen	Contoh foto
1	perundang-undangan (UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).	Terlampir
2	Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.	Terlampir
3	Dokumentasi produk ilegal sitaan BBPOM kota Bandarlampung	

Sumber : *diolah peneliti, 2017*

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan. Adapun hasil observasi yang telah peneliti lakukan yaitu kinerja pegawai BBPOM Kota Bandarlampung sudah cukup baik, program *Pre market* dan *Post market* sudah berjalan cukup baik sesuai dengan tujuan membantu mengurangi produk ilegal di masyarakat, serta sudah banyak produk ilegal yang telah disita oleh BBPOM Kota Bandarlampung.

E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data selesai dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data tersebut meliputi:

1. Seleksi data, yaitu untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau tidak dalam pengumpulan data dan untuk mengetahui apakah data telah sesuai dengan pokok bahasan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan data, yaitu menentukan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan sistematis berdasarkan kerangka tulisan yang telah ditetapkan.

Setelah data yang terkumpul selesai diseleksi, kemudian disusun secara sistematis dengan memasukkan ke dalam kelompok bahasan masing-masing, kemudian dilakukan penganalisisan untuk mendapatkan gambaran yang benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:335), menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:337), aktivitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Pada dasarnya penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan inti sari dari serangkaian hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi, serta dokumentasi hasil penelitian.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong, untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria, diantaranya :

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data (*credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan cara Triangulasi. Menurut Sugiyono, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Dengan teknik triangulasi, data yang diperoleh akan lebih konsisten, akurat dan tuntas. Kekuatan data yang dimiliki peneliti akan lebih meningkat kekuatannya dibandingkan dengan satu pendekatan saja.

Tabel 4. Contoh Tabel Triangulasi

No.	Informan	Wawancara	Dokumen	Observasi	Point utama
1	Drs. Tri Suyarto, Apt	<p>1. Informasi mengenai bagaimana program <i>pre market</i> dan <i>post market</i> BBPOM berjalan dalam mengurangi produk ilegal.</p> <p>2. Informasi tentang apasajakah hal-hal yang menghambat program <i>pre market</i> dan <i>post market</i> BBPOM dalam upaya mengurangi produk ilegal.</p> <p>3. informasi apakah program <i>pre market</i> dan <i>post market</i> BBPOM sudah efektif dalam mengurangi produk ilegal di provinsi Lampung.</p>	<p>1. Perundang-undangan (UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)</p> <p>2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p>	<p>Dokumentasi produk ilegal sitaan BBPOM kota Bandar Lampung</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • program ini dijalankan dengan dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Bea cukai serta instansi terkait. • kendala dan faktor penghambat yang ada dalam program ini adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia. • Se jauh ini program sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan mencapai tujuan dari program tersebut.
		<p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • program ini dijalankan dengan dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Bea cukai serta instansi terkait. kendala dan faktor penghambat yang ada dalam program ini adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan Se jauh ini program sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan mencapai tujuan dari program tersebut. 			

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 2017

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan tersebut berasal dari BBPOM Kota Bandarlampung, Arsip dan Dokumentasi BBPOM Kota Bandarlampung, beberapa konsumen dan pelaku industri di Bandarlampung.

2. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan (*Dependability*)

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, akan tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability-nya*, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian yang dilakukan peneliti benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

3. Teknik Kepastian Data (*Confirmability*)

Teknik pengujian *confirmability* dilakukan untuk mengetahui proses penelitian, sehingga tidak memunculkan penelitian yang hanya ada hasilnya tetapi tidak ada proses penelitian. Dalam pengujian kepastian data sama halnya dengan uji kebergantungan sehingga prosesnya dilakukan melalui diskusi dengan dosen pembimbing serta dosen pembahas. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.

4. Keteralihan (*Transferability*)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program *Pre-market* dan *Post-market* dalam membantu mengurangi peredaran produk ilegal di masyarakat sudah cukup efektif dan masih dapat dioptimalkan lagi. Hal tersebut ditinjau dari beberapa indikator efektivitas program yaitu:

- ketepatan sasaran program *Pre-market* dan *Post-market* dalam membantu mengurangi peredaran produk ilegal di masyarakat sudah cukup efektif hal ini dapat dilihat dari persentase keberhasilan yang ada di dalam lakip BBPOM kota Bandarlampung.
- Sosialisasi program yang sudah dilakukan cukup baik dengan cara sosialisasi secara langsung dan tidak langsung melalui berbagai cara seperti dengan menggunakan media cetak dan media *online*, spanduk serta web pelayanan dan pengaduan konsumen yang telah disediakan BBPOM Kota Bandarlampung.

- Pencapaian tujuan program *Pre-market* dan *Post-market* dalam membantu mengurangi peredaran produk ilegal di masyarakat sudah cukup efektif dapat dilihat dari berkurangnya produk ilegal di masyarakat setiap tahunnya.
 - Pemantauan dan Pengawasan terkait program *Pre-market* dan *Post-market* dalam membantu mengurangi peredaran produk ilegal di masyarakat yang sudah dilakukan cukup baik oleh pihak penyelenggara.
2. Yang menjadi faktor penghambatan program ini adalah faktor internal dan faktor eksternal, dalam faktor internal yang menjadi penghambat ialah masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dengan cakupan wilayah kerja BBPOM Kota Bandarlampung yang sangatlah luas yaitu satu Provinsi Lampung membuat kurang maksimalnya pelaksanaan pengurangan peredaran produk ilegal tersebut. Sedangkan faktor eksternal penghambat program ini ialah pelaku industri yang masih saja didapati menyimpan produk ilegal dan menjual produk ilegal tersebut, adapun faktor eksternal lain yaitu masyarakat yang tidak mau bekerjasama dalam membantu mengurangi peredaran produk ilegal dengan cara melaporkan dan tidak membeli produk ilegal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. BBPOM Kota Bandarlampung sebaiknya meningkatkan Pengawasan dan Soliasasi terkait peredaran produk ilegal dengan cara pengawasan secara

langsung dan lebih sering lagi terhadap seluruh pelaku industri, sedang sosialisasi terkait bahaya produk ilegal dan program pengurangan produk ilegal *Pre-market* dan *Post-market* lebih di maksimalkan lagi melalui sosialisai secara langsung maupun tidak langsung.

2. BPOM Kota Bandarlampung dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sebaiknya berkerjasama dengan penegak hukum dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku industri yang masih mengedarkan produk ilegal dan memasarkan produk ilegal dimasyarakat.
3. Pelaku Industri diharapkan lebih menumbuhkan kesadarannya tentang bahaya peredaran produk ilegal dan takut akan sanksi yang diberikan oleh penegak hukum jika mengedarkan produk ilegal dimasyarakat, agar dapat membatu BPOM Kota Bandarlampung dalam mengurai produk ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua* Yogyakarta.
- Georgopolous, Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Handyaningrat, Soewarno. 2006. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV.Alfabeta
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy) diterjemahkan oleh Ricky Istamto*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kotler, Phillip, 2000, *Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan dan Kontrol*, diterjemahkan oleh Hendra Teguh dan Ronny Rusli, Edisi Revisi, Jilid 1. Jakarta : Prenhalindo.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Moleong, Lexy.2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Siagian Sondang. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama Cetakan Kedua, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Stanton, J William.1996.*Prinsip Pemasaran*.Erlangga.Jakarta.

- Sedarmayanti. 2006. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja*, Bandung. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Ombak Dua.
- Syafiie, 1999. *Ilmu Adminitrasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Winardi. 2010. *Manajemen Prilaku Organisasi*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Jakarta: PT Buku Kita.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju.

Sumber lain:

UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan, organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen.

Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005 tentang perubahan ke enam atas keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen.

Jurnal Ni Wayan Budiani berjudul Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar.

Koran Lampost tanggal 20 Desember 2016

<http://www.fajarsumatera.co.id/2016/12/bpom-lampung-musnahkan-produk-ilegal.html>